

KAJIAN PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR DESA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN SIGI, SULAWESI TENGAH



Oleh: *Ilyas*¹

ABSTRAK

Konflik antar desa di Kabupaten Sigi adalah sebuah fenomena konflik dengan nuansa yang unik, karena melibatkan masyarakat dari kelompok etnis dan agama yang sama, Kaili dan Islam bahkan tidak jarang memiliki ikatan kekerabatan yang relatif dekat. Perbedaan yang menonjol hanya wilayah administrasi dan batas wilayah suatu desa. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan akar konflik antar desa yang selama ini terjadi dan mengidentifikasi kearifan lokal di Kabupaten Sigi yang dapat dijadikan sebagai media resolusi konflik serta upaya membangun harmoni sosial masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik antardesa kebanyakan dipicu oleh persoalan sepele yang bersifat personal lalu berubah menjadi lebih komunal dengan menonjolkan identitas pembeda berdasarkan batas wilayah sehingga berubah menjadi konflik antardesa. Model penyelesaian konflik antardesa dan antar kampung yang telah dikembangkan adalah dengan menggunakan pendekatan adat, di mana proses kesepakatan damai diikuti dengan penetapan sanksi adat yang akan diterapkan kepada pihak-pihak yang melanggar kesepakatan.

Keyword: Model, Resolusi Konflik, Konflik Antar Desa, Kearifan Lokal, Harmoni Sosial

PENDAHULUAN

Kabupaten Sigi akhir-akhir ini begitu terkenal di media nasional, bahkan hingga ke media internasional. Penyebabnya bukan karena prestasi aparat pemerintahan atau hasil pembangunan yang spektakuler di daerah tersebut tetapi karena konflik kekerasan antar desa atau antar kampung yang terjadi secara periodik. Berdasarkan data yang di rilis oleh Polda Sulawesi Tengah, terjadi 104 kejadian konflik kekerasan di Sulawesi Tengah dan 60 kasus diantaranya terjadi di Kabupaten Sigi sepanjang tahun 2012 (Nawawi, 2012:24). Akibatnya Kabupaten Sigi sering disebut sebagai kabupaten dengan “PAD” tertinggi di Sulawesi Tengah, meski PAD yang dimaksud bukan Pendapatan Asli Daerah tetapi “Perkelahian Antar Desa”.

Konflik ini dalam konteks Sulawesi Tengah dan khususnya Kabupaten Sigi adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Heterogenitas masyarakat dan trauma konflik Poso yang berdarah-darah adalah suatu yang patut dicermati, sehingga memerlukan penanganan yang serius dari semua pihak dalam upaya antisipasi dan penanganannya.

¹ Staf Pengajar Ilmu Komunikasi Fisip Untad

Bila mencermati aspek demografi dan sosial pada kabupaten baru tersebut, harus disadari bahwa di wilayah ini keberagaman etnik dan agama menjadi lebih berimbang. Beberapa etnis yang cukup besar populasinya adalah Kaili (terdapat beberapa Sub-etnis seperti Kaili Ledo dan Daa'), Kulawi, Napu, Bada, Bugis, Minahasa, Gorontalo, Bali, Jawa dan Mandar. Sementara agama yang dianut adalah Islam dan Kristen dalam porsi yang relatif berimbang, Katolik, Hindu dan Budha. Beberapa kecamatan yang didominasi oleh Kristen adalah, Kulawi, Kulawi Selatan, Pipikoro, Lindu, Palolo, Marawola Barat dan Marawola. Selebihnya di dominasi oleh Islam. Dalam hal jumlah penduduk beragama Islam (sekitar 55 %), Kristen (40%) dan sisanya (5%) penganut agama lainnya (Marzuki, 2008).

Secara lebih spesifik, jika kita cermati subetnik Kaili yang dimendiami Kabupaten Sigi berdasarkan dialek bahasanya dapat diidentifikasi sebagai berikut; Kaili Ledo (Lando, Biromaru, Dolo, sebagian Kinovaro, Kalukubula dan Raranggunao); Kaili Ija (Bora, Watunonju, Oloboju sebagian dataran Palolo, Sibowi dan Sidondo); Kaili Ado (Lambara, sebagian Sibalaya, Saluki); Kaili Edo (Pandere, Pakuli dan sebagian Sibalaya); Kaili Inde (Sebagian Dolo Selatan, Dolo Barat dan sebagian Kinovaro); Kaili Da'a (Marawola, Marawola Barat, sebagian Kinovaro). Suku Kulawi/Pipikoro yang diidentifikasi berbeda berdasarkan dialek bahasa seperti Moma (Kulawi, Bolapapu, Toro dan Tangkulowi); Tado (dataran Lindu); Uma (Winatu, Gimpu, Pilimakujawa, Peana, Kantewu, Lawe, Towulu); Aria (Mapahi, Banasu, Karangana); dan Doa (Tomado, Pantunuasu, Rondingo), (RIPKA Kab Sigi, Bappeda, 2011).

Kabupaten Sigi yang secara geografis dan etnisitas memiliki keunikan yang sangat kaya akan ornamen historis, kultural, ekonomi dan simbol-simbol sosial lainnya menjadi satu kabupaten yang seringkali mengalami benturan antar kampung, antar desa/kelurahan, antar komunitas yang dilatar belakangi oleh pemaknaan yang sulit dipahami dalam konteks rasionalitas, tetapi hanya bisa dipahami dalam konteks ideasional yang membutuhkan pendalaman dan kajian yang kontekstual dan partisipatif.

Bahkan berdasarkan hasil kajian Marzuki (2012;4) mengatakan bahwa konflik yang terjadi di Kabupaten Sigi maupun di Kota Palu adalah sebuah anomali. Ia mendasarkan argumentasinya pada hasil telaah teoritis konflik di daerah ini, di mana disebabkan oleh factor-faktor pembeda yang kecil jika dibandingkan persamaan yang begitu besar. Konflik di Sigi maupun di Kota Palu sulit dipahami dari perspektif homogenitas (sosial dan budaya) karena mereka yang berkonflik memiliki identitas sosial yang sama diantaranya; 1) sama-sama beragama Islam dengan afiliasi keagamaan Al-Khairaat, 2) Sama-sama berlatarbelakang Suku Kaili dan dialek bahasa Kaili yang sama, yakni Ledo vs Ledo, Rai vs Rai, Ija vs Ija, Ado vs Ado dan lain sebagainya. 3) Sama-sama masyarakat petani yang hidup dari komoditi pertanian sawah dan kelapa. 4) Bahkan warga yang berkonflik masih terikat dalam ikatan keluarga dan kerabat yang dekat. Faktor pembedanya hanyalah factor wilayah

administrative pemerintahan yakni Desa atau kelurahan. Namun factor pembeda yang relative kecil tersebut cenderung menjadi factor utama yang melakukan proses-proses pematangan eskalasi konflik, dari konflik laten ke konflik terbuka.

Konflik yang terjadi diberbagai wilayah, baik yang motifnya etnik, agama, batas wilayah maupun konflik vertical (separatism dan pembangkangan terhadap pemerintah yang sah) memberi bukti bahwa kekokohan bangunan supra-struktur negara kebangsaan sangat rapuh. Ada dua faktor penyebab kerapuhan fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. *Pertama*, doktrin ideologis “Bhineka Tunggal Ika” telah diselewengkan oleh sebuah kekuatan yang berorientasi pada pemerintahan pusat. Akibatnya daerah-daerah kurang diberi kepercayaan untuk mengurus dirinya sendiri (Suparlan, 2002). *Kedua*, Pembangunan yang dilakukan di atas sebuah komunitas plural lebih memaksakan pola yang berkarakteristik penyeragaman berbagai aspek sistem sosial, politik dan budaya. Ada tiga hal yang biasa melatar belakangi munculnya disinteraksi antara kelompok mayoritas dan orang-orang yang termasuk dalam kelompok minoritas (Purwasito, 2003: 147), yaitu: (1) prasangka historis, (2) diskriminasi dan (3) perasaan *superioritas in-group feeling* yang berlebihan dengan menganggap inferior pihak yang lain (*out-group*).

Konflik sering memperkuat dan mempertegas batas kelompok dan meningkatkan penggalangan solidaritas internal kelompok. Konflik antar kelompok merupakan penghadapan antara *in-group* dan *out-group*. Ketika konflik terjadi, masing-masing anggota dalam suatu kelompok akan meningkatkan kesadaran sebagai sebuah kelompok (*in-group*) untuk berhadapan dengan kelompok lain (*out-group*). Konflik dapat menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial lainnya. (Poloma, 1987 dalam Ilyas, 2010).

Konflik sebagai suatu fenomena sosial budaya dapat saja dipahami dengan berbagai cara dan dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Seperti pemahaman Dixon yang melihat dari aspek keberingasan sosial. Menurut Dixon (dalam Boedhisantoso, 1999:21) keberingasan sosial disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk yang semakin tinggi angkanya. Ditambahkan juga oleh S. Boedhisantoso (1999:23) bahwa tekanan keterbatasan lingkungan (*environmental scarcity*) dan ketidakberdayaan sebagian besar penduduk dalam memperebutkan sumberdaya dan lingkungan yang sehat itu biasanya memancing pertikaian sosial yang disertai kekerasan (*violent conflict*), dan apabila tidak ditanggulangi dengan sungguh-sungguh akan berkelanjutan.

Pemahaman yang berbeda dikemukakan oleh Junaidi (2008:77) bahwa, konflik merupakan proses dinamis yang membawa pada perubahan, dari situasi konflik menuju kepada situasi damai. Pemahaman ini pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh pendekatan transformasi konflik. Sementara itu, Kurnia (2008:100), melihat konflik

dari sisi advokasi dengan mengatakan bahwa aspek kebijakan publik sejatinya menjadi perhatian yang serius karena dari sana bisa memicu terjadinya konflik.

Secara mendasar konflik dapat saja dipahami sebagai sebuah perjuangan antar individu atau kelompok untuk memenangkan sesuatu tujuan yang sama-sama ingin mereka capai (Suparlan, 2002:7). Artinya, dapat dipahami bahwa konflik umumnya dilahirkan dari adanya kepentingan baik sifatnya individual atau kelompok yang harus dipenuhi. Dengan demikian setiap masyarakat tentunya berpotensi mengalami konflik, terlebih ketika upaya pemenuhan kepentingan tersebut dilakukan dengan mengorbankan kepentingan seseorang lainnya dan mengabaikan aturan main. Bahkan menurut Suparlan (2002:11) akumulasi dari perbuatan yang merugikan dari pihak lawan biasanya akan terungkap dalam bentuk kemarahan dan amuk, seperti konflik fisik yang terjadi di kabupaten Poso pada tahun 1998 hingga 2007.

Sementara itu temuan penelitian yang dilaksanakan oleh Tirtosudarmo, 2007 tentang Etnopolitik Pemekaran Wilayah: Riau dan Sulawesi Tengah menyimpulkan bahwa dinamika politik di Sulawesi Tengah cenderung “berproses ke dalam” di mana telah menimbulkan konflik komunal yang penuh kekerasan, berbeda yang terjadi di Riau proses pemekaran baik di tingkat propinsi maupun kabupaten berjalan tanpa terjadi konflik kekerasan. Proses pemekaran wilayah, disamping perebutan posisi-posisi politik di pemerintahan yang terjadi di Sulteng oleh beberapa studi lain yang dilakukan oleh (Aragon, 2007) sebagai latar belakang yang penting dalam kontestasi politik antara berbagai kelompok masyarakat terutama di Kabupaten Poso yang dilandasi oleh factor etnisitas dan agama.

Mencermati kondisi tersebut di atas, tampaknya diperlukan suatu model penyelesaian konflik antar desa/kelurahan yang khas dibandingkan dengan model penyelesaian konflik sosial dengan motif agama dan etnis. Pengalaman peneliti ketika mengikuti pelatihan di American University, Washington DC, USA tahun 2009 lalu, memperlihatkan bahwa konflik antar desa/kelurahan dengan komposisi etnis dan agama yang relative sama, jarang dan amat kecil kemungkinannya terjadi. Jika kita mencontoh apa yang terjadi di Negara-negara Afrika dan Gurun Sahara misalnya, konflik muncul antar wilayah dengan spektrum yang relative kecil tetapi dilatari oleh perbedaan agama, kaum atau sering disebut dengan kafilah (Nimer, 2009). Maka ketika kita diperhadapkan dengan konflik yang terjadi di lembah Palu, terutama Kabupaten Sigi dan Kota Palu yang dari segi agama relative sama dan etnis yang sesama Kaili, asumsi yang muncul adalah dibutuhkan sebuah mekanisme penyelesaian konflik yang baru berbeda dengan metode yang pernah dilakukan. Artinya dibutuhkan sebuah model baru, kerangka baru penyelesaian konflik yang secara teoritis bisa saja berbeda dengan model lain yang sudah mapan.

Negeri ini harusnya berkaca pada negara-negara yang telah gagal mengelola perbedaan etnis, agama dan budaya yang akhirnya harus pecah atau terlibat konflik

secara terus-menerus. Konflik bernuansa SARA yang pernah terjadi dan kini malah kembali marak di Indonesia juga menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia kurang memiliki kesadaran multikultur. Yang paling mutakhir dihadapan kita adalah konflik etnis yang terjadi di Lampung dan Sumbawa. Meski dengan nuansa yang berbeda konflik antardesa yang terus terulang di Kabupaten Sigi, menunjukkan bahwa telah terjadi kerapuhan bangunan dan tatanan sosial kita dalam kehidupan bersama, berdampingan secara damai.

Penyelesaian konflik yang tidak menyentuh kepada aspek penyadaran, hanya seperti memadamkan api sekejap tetapi kemudian bisa kembali membara jika diterpa angin. Pemerintah dan aparat keamanan seringkali hanya mengedepankan aspek seremonial berupa tandatangan kesepakatan damai, jabat tangan, gandengan tangan tetapi tidak pernah mendalami aspek masalah terdalam yang menjadi sumber dan akar konflik. Mereka seringkali abai untuk mendasarkan penyelesaian konflik melalui kajian dan pemetaan mendalam baik sumber, akar, pemicu hingga pada level actor sehingga yang muncul adalah seremoni belaka.

Penelitian ini menawarkan sebuah gagasan tentang penelusuran mendalam dan merumuskan semacam model yang dikonstruksi dari kearifan lokal di Kabupaten Sigi. Secara singkat penelitian ini hendak mengurai : (1) gambaran yang utuh mengenai isu-isu dan masalah yang sering menyebabkan terjadinya konflik kekerasan antardesa atau antar kampung di Kabupaten Sigi; (2) identifikasi bentuk-bentuk dan model kearifan lokal budaya di Kabupaten Sigi yang dapat dijadikan sebagai kerangka acuan pengembangan model penyelesaian konflik antardesa yang efektif; (3) menemukan sebuah model alternatif penyelesaian konflik antar wilayah/desa dan batas-batas wilayah berbasis budaya lokal yang dapat diterapkan di berbagai wilayah dengan pendekatan lain.

Untuk memberikan arah dan kejelasan metodologis maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam proses eksplanasi. Strategi penelitian deskriptif kualitatif dapat digolongkan ke dalam dua cara yaitu metode interaktif dan metode non interaktif atau dokumentatif. Sementara untuk proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (*in depth interview*), observasi dan studi dokumentasi. Informan penelitian ditetapkan secara *purposive* dengan mempertimbangkan entitas kebudayaan dan sejarah Kabupaten Sigi, dengan berupaya menggambarkan secara utuh aspek kearifan lokal yang dapat diadopsi dalam upaya resolusi konflik. Karenanya informan dalam penelitian ini terdiri dari tokoh adat Kab. Sigi, Kepala Kesbangpol, Camat, Akademisi serta tokoh agama. Data dan informasi yang telah dikumpulkan melalui metode pengamatan, wawancara individual saat ini dianalisis dengan metode intepretasi makna data. Dalam proses interpretasi makna data tersebut telah berproses dan saat ini telah mencapai tahap penulisan akhir.

Fenomena Konflik Antar Desa atau Antar Kampung

Salah satu tipologi konflik yang terjadi secara beruntun di Kabupaten Sigi adalah konflik antar desa atau antar kampung. Konflik ini sebagian besar hanya disebabkan oleh masalah-masalah sepele misalnya hanya persoalan bersenggolan di pesta, suara motor yang keras ketika melintas di jalan desa tetangga, saling ejek antar anak muda, kalah pertandingan sepak bola atau masalah perselisihan anak muda lainnya. Namun demikian konflik antar desa ini tidak bisa hanya dilihat dari pemicu konfliknya saja, pada beberapa desa berkonflik, memiliki sejarah konflik yang panjang dan dapat ditelusuri beragam masalah yang sudah kadung menjadi akar konflik yang sulit dilepaskan dari entitas tersebut. Terdapat desa yang secara turun temurun melanggengkan pertikaian dengan alasan harga diri dan kehormatan kampung, di mana anak-anak muda diceritakan hal-hal heroik pertikaian orang tua mereka dengan desa tetangga.

Berdasarkan catatan pihak Polda Sulteng sepanjang tahun 2012, terjadi 60 kasus bentrok di Kabupaten Sigi. Insiden tersebut terjadi di hampir seluruh kecamatan di Lembah Sigi dan melibatkan desa-desa tertentu yang memiliki sejarah konflik berkepanjangan. Data berikut ini menyajikan beberapa insiden yang menyebabkan korban jiwa dan luka-luka.

Sementara pada awal tahun 2013 saja telah terjadi 5 kali kasus bentrok di Sigi¹¹. Berdasarkan data yang dihimpun, konflik terbesar terjadi antara Desa Pesaku, Kecamatan Dolo Barat dengan Desa Sidondo, Kecamatan Sigi Biromaru, akibatnya 24 rumah warga dan tiga unit sepeda motor dibakar yang berada di Dusun IV Desa Pesaku pada hari minggu 19 Mei 2013 sekitar pukul 21.00 Wita.

Hasil penelitian dan wawancara mendalam yang dilakukan sepanjang proses penelitian, akar dan sumber konflik antar desa di Kabupaten Sigi dapat dikategorikan dalam beberapa isu berikut ini;

1. *Historis Permukiman dan Kewilayahan*

Klaim historis atas hak kepemilikan dan penguasaan (tenurial) lahan dalam banyak kasus seringkali dijadikan sebagai alasan untuk menuntut pengembalian lahan atau tanah. Seiring dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan spasial yang didorong oleh kebutuhan membangun, lahan-lahan yang pada awalnya adalah wilayah yang tanpa peruntukan menjadi semakin mengecil akibat hadirnya berbagai bangunan fisik yang berbarengan dengan meningkatnya nilai atau harga tanah. Diperhadapkan oleh berbagai keterbatasan, klaim kesejarahan seolah-olah merupakan cara yang absah dan efektif dalam meraih sumber daya yang terbatas, apalagi jika fungsi-fungsi pemerintahan lokal dalam urusan hak-hak keperdataan justru membingungkan dan

¹¹ Catatan Kapolda Sulteng, Brigjen Ari Dono Sukmanto, disampaikan pada diskusi Upaya penyelesaian Konflik di Sulteng, Kantor P4K Untad, 25 Mei 2013

menimbulkan ketidakpastian. Batas wilayah Sigi misalnya, yakni Batas Kelurahan dan Batas Desa yang tidak terselesaikan seringkali menjadi isu yang mengemuka ketika konflik kekerasan berlangsung. Kewilayahan Sigi belum sepenuhnya lepas dari ikatan masa pemerintahan kerajaan yang terikat pada satuan wilayah yang relatif lebih kecil.

2. Transformasi Romantisme Kekerasan

Disadari atau tidak spirit kekerasan yang dikemas melalui kisah-kisah heroik dari satu generasi ke generasi lainnya turut berkontribusi dalam membentuk kesadaran naif terhadap kekerasan. Akar konflik yang tidak terselesaikan dan mengendap dalam memori kolektif warga, melahirkan aktor-aktor dalam setiap periode konflik yang terjadi, dimana setiap aktor selalu menceritakan kisah pertarungan atau perlawanan mereka kepada anak-anak dan remaja. Kekerasan yang terjadi selama ini mendapat dukungan dan justifikasi dari para orang tua yang ditandai dengan melakukan pembelaan terhadap pelaku kekerasan.

3. Penegakan Hukum yang Rendah

Dalam banyak kasus konflik kekerasan yang terjadi di Sigi, para aktor mengungkapkan bahwa pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang memiliki kesadaran dan ketaatan hukum. Peristiwa kriminal yang awalnya bersumber dari segelintir orang yang sangat jelas baik pelaku maupun korbannya dalam perjalanan waktu disebabkan oleh rendahnya kepekaan sosial dan kultural aparat keamanan sehingga nampak sangat lambat ditangani seringkali menjadi sumber kemarahan warga bahkan cenderung dipersepsikan sebagai pembiaran serta perlakuan yang tidak adil.

Dalam kasus konflik menahun, persepsi para aktor konflik kekerasan komunal bahwa aparat keamanan telah bersikap tidak adil atau pandang bulu dinyatakan secara gamblang bahwa aparat keamanan hanya tegas dan berlaku adil dalam menindak jika yang menjadi korban adalah pihak lawan atau musuh mereka, sementara jika yang terjadi adalah sebaliknya, aparat keamanan justru cenderung tidak adil dan melakukan pembiaran. Dalam kasus-kasus konflik kekerasan di Kabupaten Sigi, rangkaian penyelesaian konflik kekerasan tidak diikuti oleh penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan ditandai dengan munculnya pandangan masyarakat di kedua kelompok yang menganggap bahwa dalam berbagai kasus kekerasan tidak ada pelaku yang ditindak secara adil bahkan ada upaya untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku yang akan ditindak karena adanya jaminan dari pihak-pihak tertentu terhadap pelaku. Masyarakat menengarai polisi tidak memahami penegakan hukum yang bersifat *afirmativ* (keberpihakan terhadap kasus yang bersifat khusus). Aparat juga seringkali dinilai telah melakukan pembiaran atas keadaan yang didasarkan pada tidak konsistenan menjalankan Maklumat tentang Larangan Membawa Senjata Tajam dan Benda-Benda Berbahaya Lainnya, hal itu dibuktikan dengan terjadinya kasus kekerasan yang berulang-ulang. Tidak ada pemberian efek jera terhadap para pelaku kekerasan.

4. Lapangan Kerja dan Angkatan Kerja

Ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dalam kondisi kehidupan yang cenderung konsumtif serta godaan pasar produk yang hadir dalam ruang-ruang pribadi sehari-hari cenderung menimbulkan rasa keterpurukan dan frustrasi yang kompleks. Keadaan ini sangat mungkin terjadi dimana akses terhadap sistem mata pencarian atau pekerjaan dibatasi oleh kapasitas yang tidak mencukupi. Keterbatasan akses terhadap lapangan kerja karena ketidaksesuaian antara keterampilan dan ijasah yang dimiliki. Sumberdaya lahan pertanian yang terus berkurang karena peralihan fungsi dan peruntukan menyebabkan angkatan kerja sulit memperoleh pekerjaan di sektor ini, sementara sektor jasa dan industri di kedua wilayah ini relatif belum mampu menampung angkatan kerja yang ada.

Sebagai konsekwensi dari situasi tersebut, stress dan frustrasi, apalagi jika terjadi dalam jangka waktu yang relatif lama dan dialami oleh banyak orang merupakan faktor yang memengaruhi tumbuh suburnya kriminalitas sebagai jalan pintas atas pemenuhan keinginan yang tidak dapat dicapai secara wajar. Kriminalitas tentu saja menjadi alat yang efektif dalam memicu terjadinya konflik kekerasan. Pada wilayah kampung di Kabupaten Sigi rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya pengangguran merupakan lahan yang subur bagi terjadinya konflik kekerasan.

5. Pergeseran Skala Konflik

Seingkali masyarakat pada umumnya menunjukkan rasa heran dan seolah-olah tidak percaya, mengapa peristiwa-peristiwa yang nampaknya sepele dan melibatkan pelaku yang sangat personal, dalam waktu singkat berubah menjadi konflik kekerasan yang melibatkan orang sekampung yang berhadapan-hadapan dengan orang sekampung lainnya sebagai musuh. Di samping persoalan penegakan keamanan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, pergeseran skala dari konflik personal menjadi konflik komunal yang terjadi di Kabupaten Sigi terjadi dengan cara yang khas yaitu melalui mengaktifkan simbol-simbol komunal bahkan dengan cara mengeksploitasi kesadaran naif yang melekat pada ruang kesadaran komunitas.

6. Ruang Publik dan Pembinaan Generasi Muda

Terbatasnya ruang publik sebagai wahana untuk mengekspresikan diri, khususnya bagi kalangan generasi muda telah mendorong mereka untuk berekspresi di ruang-ruang lain yang pada saat bersamaan juga dibatasi oleh hak-hak orang lain, yang tentu saja menimbulkan reaksi balik. Di Kabupaten Sigi misalnya, dimana ruang publik yang tersedia di wilayah yang sering berkonflik relatif terbatas akibatnya jalan raya menjadi ruang area publik untuk mengekspresikan diri khususnya pada malam hari, sehingga penggunaan jalan raya sebagai area publik seringkali menjadi area provokasi berupa penggunaan kendaraan bermotor yang melaju kemudia diikuti dengan teriakan kata-kata kotor menjadi pemicu munculnya kemarahan kolektif. Salah satu bentuk ruang publik bagi generasi muda adalah sarana olah raga dan seni yang relatif minim

atau tidak tersedia dengan layak, akibatnya tidak ada tempat untuk menyalurkan energi bagi para generasi muda dan yang terjadi justru energi tersebut disalurkan dengan cara yang merugikan hak dan kepentingan orang lain.

7. Bias dan Distorsi Informasi

Baik bias maupun distorsi informasi sebenarnya merupakan sesuatu yang sering ditemukan baik dalam situasi konflik maupun normal, dan baik disengaja ataupun tidak. Namun demikian, dalam situasi konflik, informasi yang diperoleh secara tidak berimbang dapat menyebabkan konflik data sehingga akan sangat mempengaruhi keputusan yang diambil. Konflik data, di samping karena adanya informasi yang keliru, baik yang memang sengaja dimanipulasi untuk kepentingan dan keuntungan pihak yang memproduksi informasi baik dalam bentuk pemutarbalikan fakta, informasi yang simpang siur, bahkan melalui media cetak maupun elektronik yang berkarakter jurnalisme perang.

Bias maupun distorsi informasi juga muncul karena kesalahan dalam menerjemahkan informasi yang diterima. Berdasarkan catatan dari berbagai kasus di lapangan, konflik kekerasan baik yang terjadi di Kabupaten Sigi, media yang digunakan dalam menyebarkan bias atau distorsi informasi biasanya bersumber dari: desas-desus atau cerita dari mulut ke mulut yang kadangkala berbentuk gossip, SMS gelap, hingga media cetak maupun elektronik.

Kearifan Lokal dalam Mencari Damai

Sebagai sebuah entitas wilayah yang ragam corak budayanya dipengaruhi oleh berbagai etnis, Kabupaten Sigi sesungguhnya memiliki kekayaan kearifan lokal yang terkait dengan mekanisme penyelesaian konflik. Selain model-model penyelesaian konflik yang sudah ada secara teoretis, harus diingat juga bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa besar yang memiliki keragaman budaya. Setiap budaya memiliki kearifan-kearifan tersendiri dalam menyikapi permasalahan hidup yang dihadapi, termasuk di dalamnya kearifan dalam menyelesaikan konflik. Kearifan-kearifan seperti inilah yang sering disebut sebagai kearifan lokal (*local wisdom*).

Selain terbuka dan bersifat dinamis, ternyata budaya lokal juga memiliki daya dan pengaruh yang terbatas pada wilayah dimana budaya itu hidup dan berkembang. Seperti *pela* dan *gandong* di Maluku, berdasarkan catatan dari Erry Rhinaldhy (dalam Malik, 2007), baru 20 % saja negeri-negeri yang memiliki hubungan *pela* dan *gandong*. Maka ketika seluruh negeri- negeri di Maluku berkonflik, maka ikatan *pela gandong* yang terbatas pada beberapa negeri ini kehilangan daya dan pengaruhnya untuk menyelesaikan konflik kekerasan yang terjadi. Gerakan Baku Bae Maluku pada hakikatnya merupakan gerakan *pela gandong* semesta, yang mencakup seluruh negeri-negeri di Maluku. Gerakan *baku bae* melepaskan diri dari keterbatasan yang ada pada ikatan *pela gandong*.

Demikian juga halnya dengan budaya *motambu tana*, yang hanya berkembang di daerah Poso, utamanya di daerah Pamona dan Napu dan tidak menjadi kearifan lokal yang dipahami oleh setiap warga di Kabupaten Poso terlebih di Sulawesi Tengah (Amirrachman, 2007). Berdasarkan hal tersebut, entitas etnis dan wilayah administratif harus melakukan revitalisasi terhadap budaya-budaya lokal sebagai mekanisme resolusi konflik dan sebagai bangunan *early warning sistem* dalam menghadapi kemajemukan yang berpotensi konflik sosial.

Hal yang sangat tepat menyelesaikan konflik dengan menggunakan adat lokal atau kearifan lokal karena selama ini sudah membudaya dalam masyarakat. Oleh karena kearifan lokal adalah sesuatu yang sudah mengakar dan biasanya tidak hanya berorientasi profan semata, tetapi juga berorientasi sakral sehingga pelaksanaannya bisa lebih cepat dan mudah diterima oleh masyarakat. Dengan adat lokal ini diharapkan resolusi konflik bisa cepat terwujud, bisa diterima semua kelompok sehingga tidak ada lagi konflik laten yang tersembunyi dalam masyarakat.

Di kabupaten Sigi, sebenarnya banyak ditemukan mekanisme penyelesaian konflik berbasis masyarakat. Salah satunya adalah kearifan lokal *Nosarara Nosabatutu*. Nilai lokal ini meskipun masih diperdebatkan konsepsinya oleh beberapa tokoh adat Kaili, namun nilai-nilai ini sesungguhnya merupakan warisan yang luhur dari etnis Kaili yang mendiami Tanah Kaili atau Lembah Palu. Kini secara administratif daerah itu telah terbagi menjadi Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi. Nilai-nilai *Nosarara Nosabatutu* adalah gagasan original yang lahir dari kearifan lokal Kaili yang seharusnya bisa dijadikan sebagai bentuk penyelesaian konflik dengan pelembagaannya yang baik. *Nosarara Nosabatutu* adalah idiom yang bermakna bahwa setiap orang yang berada di kampung atau di Tanah Kaili adalah satu, semua bersaudara. Konsep ini adalah konsep hidup multikultur yang dulunya menjadi bagian dari bentuk keterbukaan etnis Kaili terhadap pendatang.

Model Penyelesaian Konflik Alternatif

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan selama periode penelitian nampak jelas bahwa berbagai upaya dalam usaha menyelesaikan konflik di daerah Kabupaten Sigi telah banyak dilaksanakan. Hanya saja hasil dari semua bentuk penyelesaian konflik tersebut tampak tidak efektif. Penyelesaian konflik yang nuansanya kebanyakan seremonial dan hanya sebatas pada mediasi serta resolusi konflik tetapi tidak dibarengi dengan upaya penciptaan perdamaian melalui pembangunan menyebabkan upaya ini tidak juga berhasil. Jika dicermati pola pendekatan dengan menggunakan tangan-tangan aparat keamanan, melalui penandatanganan kesepakatan dan perdamaian tidak cukup efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan aparat keamanan masih sebatas penyelesaian berdasarkan pendekatan hukum dan lebih konvensional. Pertemuan dan mediasi yang dibangun oleh aparat pemerintahan nampaknya hanya melibatkan pihak-pihak bertikai dengan orang tua masing-masing. Dengan perspektif semacam ini pemerintah daerah menganggap masalah konflik di Sigi hanya sebagai kriminalitas biasa sehingga menggantungkan proses penyelesaiannya di depan kepolisian dan hanya melibatkan kedua belah pihak. Cara pandang semacam itu menunjukkan penyederhanaan terhadap apa yang terjadi di daerah tersebut. Selain itu anggapan atas adanya provokator dalam artian pihak-pihak yang menjadi pendorong terjadinya konflik berkepanjangan menunjukkan bahwa introduksi kekerasan di daerah ini berlangsung melalui tangan-tangan pihak luar. Meski dugaan ini agak sumir, tetapi jika ditelisik lebih jauh dari perspektif dan kacamata keamanan wilayah, dugaan adanya pihak-pihak yang memainkan konflik di Sigi cukup beralasan. Ada rentetan peristiwa dan kejadian-kejadian politik yang seringkali mengiringinya.

Meski demikian hal sepatutnya yang mesti dicermati adalah kerentanan masyarakat atas isu-isu yang dihembuskan pihak yang diduga provokator sebagai pemicu konflik, yang sejatinya dapat dihindari jika masyarakat memiliki sistem deteksi dini terhadap isu-isu yang tidak benar. Masyarakat secara umum, tidak memiliki sistem siaga dini yang mampu dengan cepat mendeteksi kebenaran sebuah informasi dengan melakukan klarifikasi pada pihak-pihak yang selama ini dianggap rentan dengan isu.

Upaya penyelesaian konflik di Kabupaten Sigi sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sigi tetapi telah melibatkan Gubernur Sulawesi Tengah dalam usaha mencapai perdamaian di daerah ini. Misalnya saja apa yang dilakukan pada tanggal 20-21 Agustus 2012 lalu, dimana warga dari 10 desa di Kecamatan Marawola dan Kinovaro yang pernah terlibat konflik melakukan kesepakatan damai yang difasilitasi oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Polda, Danrem 132 Tadulako dan jajaran Pemerintah Kabupaten Sigi.

Upaya perdamaian yang digagas oleh Gubernur Sulteng tersebut nampaknya tidak cukup efektif dalam menyelesaikan konflik di Sigi, sebab ternyata setelah pertemuan tersebut rentetan konflik kembali terjadi. Masalah utama yang tidak pernah diselesaikan sebetulnya adalah bagaimana mengantisipasi akar konflik, bukan sekedar pertemuan ada jabat tangan, cipika-cipiki lalu kemudian dianggap selesai dan damai. Menyelesaikan konflik menahun seperti yang terjadi di Sigi memerlukan kajian mendalam terkait dengan langkah apa yang memungkinkan untuk ditempuh dengan melakukan kritikal workshop, lalu melakukan pertemuan dengan menggunakan pendekatan adat. Dalam hal ini pelibatan kelembagaan adat menjadi penting, terutama di dalam menetapkan sanksi yang diterapkan bagi pelanggar kesepakatan. Tentu saja masalah utama yang dihadapi adalah bagaimana peran kelembagaan adat dalam

menerapkan sanksi adat tersebut, jika tidak penyelesaian hukum formal tetap menjadi alternatif.

Jika mencermati apa yang disampaikan oleh camat Marawola terkait upaya penyelesaian konflik di wilayahnya nampak ada kemajuan dengan berupaya melakukan pelibatan lembaga adat sebagai representasi kearifan lokal dan modal sosial masyarakat yang terlibat konflik. Adanya kelembagaan adat di desa sejatinya bisa menjadi perekat bagi sistem sosial kita di desa, hal ini terkait dengan peran sosial dan budaya pada kelembagaan adat yang selama ini masih dianggap sebagai lembaga yang memiliki kewibawaan sosial. Kewibawaan sosial ini bisa terus terpelihara jika kelembagaan adat tetap diberikan kewenangan dalam menetapkan kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan pranata adat di suatu wilayah.

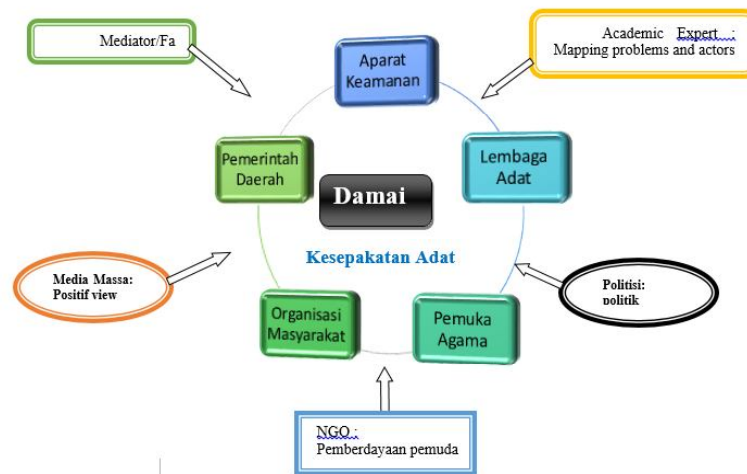
Menarik apa yang dicontohkan kelembagaan adat di Marawola yang telah mencapai kesepakatan damai atas konflik Desa Binangga dengan Desa Padende yang dilaksanakan Selasa, 25 Juni 2013. Lembaga adat kedua desa tersebut mencapai kesepakatan setelah melakukan pertemuan mengantisipasi konflik susulan. Penandatanganan kesepakatan adat tersebut dihadiri oleh Bupati Kabupaten Sigi, H. Aswadin Randalembah, Wakil Bupati, Livingstone Sango dan Sekkab, H. Husein Habibu. Turut pula di saksikan oleh unsur tripika kecamatan Marawola, diantaranya Camat Marawola, Didi Bakran, Kapolsek dan Dansek Marawola. Isi kesepakatan adat tersebut berisi lima (5) point kesepakatan yang terdiri dari:

1. *Dilarang membuat, menyampaikan, dan menerima isu yang memungkinkan akan mengakibatkan ketersinggungan, perkelahian dan perpecahan. Apabila melanggar kesepakatan ini akan di denda dengan tiga (3) ekor kambing atau berupa uang Rp. 3.600.000,-*
2. *Melakukan tindakan berupa penganiyaan, pelemparan, serta penahanan kendaraan di wilayah Desa Binangga dan Desa Padende yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Sanksi adat yang dijatuhkan jika melanggar adalah lima (5) ekor kambing atau berupa uang Rp. 5.000.000,-*
3. *Berduaan (bukan muhrim) di tempat sepi pada pukul 22.00 ke atas di wilayah Binangga dan Padende. Denda dua (2) ekor kambing atau berupa uang Rp. 2.500.000,-. Aturan ini berlaku bukan hanya bagi warga Binangga dan Padende, namun juga warga di luar kedua desa tersebut jika kedatangan berduaan pada jam yang telah ditentukan.*
4. *Menjual, mengedarkan dan mengkonsumsi miras dan narkoba. Jika ditemukan melakukan hal tersebut akan dikenakan denda lima (5) ekor kambing atau berupa uang Rp. 5.000.000,-*

5. Berjudi seperti sabung ayam, togel, tongko¹² dan sejenisnya diwilayah masing-masing. Denda tiga (3) ekor kambing atau berupa uang Rp. 3.600.000,-¹³

Model penyelesaian ini tentu saja menjadi sesuatu yang kemungkinan dapat mengurangi atau bahkan menyelesaikan konflik antar desa di daerah tersebut. Hal ini dimungkinkan oleh karena masih kuatnya ketaatan kepada kelembagaan adat pada beberapa wilayah di daerah ini. Mekanisme penyelesaian sengketa tanah atau perselisihan antar masyarakat atau dalam hubungan sosial lainnya, acapkali masih diselesaikan dengan mekanisme adat atau hukum adat. Penetapan sanksi adat atau disebut *Givu* masih merupakan bagian dari kehidupan masyarakat di Kabupaten Sigi, sehingga upaya menemukan jalan damai melalui mekanisme sanksi adat yang penerapannya dibawah kendali kelembagaan adat pada tiap wilayah administratif agar memiliki legitimasi kuat di masyarakat. Patut diingat bahwa, kepatuhan kepada hukum negara dan sekaligus aparat negara dalam hal ini kepolisian di daerah ini semakin melemah. Akibatnya konflik yang terjadi antardesa bahkan bisa berubah menjadi konflik yang memperhadapkan masyarakat dengan aparat kepolisian, sebagaimana sering terjadi di Kabupaten Sigi.

Gambar. Sketsa Model Penyelesaian Konflik Antar Desa di Kab. Sigi



Sumber: Hasil penelitian, 2013 (diolah)

¹² Sebutan lokal pada salah satu bentuk judi dengan menggunakan kartu remi

¹³ Disarikan dari wawancara dengan Camat Marawola, Didi Bakran

KESIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa akar konflik kekerasan yang bernuansa konflik antardesa dan antar kampung yang selama ini terjadi di Kabupaten Sigi adalah; 1) Sejarah wilayah dan pemukiman yang berdasarkan pada wilayah kerajaan masa lalu serta ketidakjelasan batas wilayah antar desa dan antar kampung. 2) Transformasi kekerasan yang berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya. 3) Rendahnya penegakan hukum aparat dalam menyelesaikan persoalan kriminalitas biasa yang melibatkan personal. 4) Tingginya angka pengangguran, karena keterbatasan lapangan kerja formal yang tersedia sementara anak muda relatif tidak memiliki kemampuan untuk beriwirausaha dan sudah semakin menghindari pertanian karena dianggap kurang prestise serta kurang menghasilkan. 5) Terjadinya pergeseran skala konflik kekerasan yang sifatnya personal menuju konflik komunal. 6). Kurang tersedianya ruang publik sebagai ruang ekspresi generasi muda serta kurangnya pembinaan generasi muda untuk kegiatan yang lebih produktif. 7). Bias informasi dan distorsi informasi.

Upaya penyelesaian konflik yang selama ini ditempuh melalui upaya rekonsiliasi dengan menempuh jalur pertemuan formal dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintahan setempat tidak dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antar desa dan antar kampung. Meski demikian salah satu model penyelesaian konflik yang dianggap cukup efektif adalah dengan menggunakan pendekatan adat, bentuknya adalah kesepakatan damai dengan menetapkan sanksi adat yang akan diterapkan kepada pihak-pihak yang melanggar kesepakatan. Model ini bisa berhasil dengan syarat kelembagaan adat di setiap desa di Kabupaten Sigi harus aktif dan keanggotaan atau pemangku adatnya adalah tokoh yang memiliki kharisma dan paling dipatuhi oleh warga dan sebisa mungkin terbebas dari determinan politik di Kabupaten Sigi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirrachman, Alpha (ed). 2007. *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso*. Jakarta. ICIP bekerjasama dengan Komisi Eropa
- Aragon, Lorainne V. 2007. *Persaingan elit di Sulawesi Tengah*, dalam Henk Shulte Nordholt dan Gerry Van Klinken (ed). *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta. KITLV – Obor Indonesia.
- Boedisantoso, S. 1999. Keterbatasan Lingkungan dan Keberingasan Sosial. *Antropologi Indonesia, Th. XXIII, No.5 Mei-Agustus*. Jakarta: Jurusan Antropologi Fisipol UI.
- Ilyas. 2010. *Identitas Etnik dalam Komunikasi Politik, dalam Jurnal Ilmu Komunikasi Terakreditasi B, Edisi Agustus Nomor 2*. Jurusan Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta

- Junaidi, M. 2008. *Kerawanan Sosial Korban Konflik di Poso Sulawesi Tengah*, dalam *Jurnal Perdamaian, Volume II, Nomor 2*. Palu: Pusat Penelitian Perdamaian dan Pengelolaan Konflik; Universitas Tadulako, Palu.
- Kurnia, Intam. 2008. *Kerawanan Sosial Korban Konflik di Poso Sulawesi Tengah*, dalam *Jurnal Perdamaian, Volume II Nomor 2*. Palu. Pusat Penelitian Perdamaian dan Pengelolaan Konflik; Universitas Tadulako, Palu.
- Malik, Ikhsan. 2007. *Revitalisasi Budaya Lokal Untuk Pembangunan Perdamaian di Indonesia*. Dalam *Jurnal PERDAMAIAN* Pusat Penelitian Perdamaian dan Pengelolaan Konflik Universitas Tadulako Nomor 1, Edisi Februari 2007.
- Marzuki, Muhammad. 2008. *Membangun Toleransi Dalam Pluralisme Agama*. Dalam *Jurnal PERDAMAIAN* Pusat Penelitian Perdamaian dan Pengelolaan Konflik Universitas Tadulako.
- 2012. *Maraknya Konflik Sosial Antar Warga (Desa) dan Upaya Penanganannya*. Kertas Kerja untuk FGD dengan Kapolda Sulteng (tidak dipublikasikan). Pusat Penelitian Perdamaian dan Pengelolaan Konflik Universitas Tadulako.
- Nimer, Mohammed Abu. 2009. *Nonviolence and Peace Building in Islam: Theory and Practice*. Module on Peacebuilding and Development Institute. International Service, American University. Washington DC, USA
- Nawawi, Muh, dkk. 2012. *Pemetaan Potensi Konflik Sosial dan Kajian Early Warning System Penanganan Konflik berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Sigi*. Laporan Penelitian Fundamental; dibiayai Dikti Depdikbud. Palu; Lemlit Untad
- Purwasito, Andrik. 2003. *Komunikasi Multikultural*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Suparlan, Parsudi. 2002. *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*. Makalah Simposium Internasional. Denpasar: Kajian Budaya UNUD.
- Tirtosudarmo, Riwanto. 2007. *Mencari Indonesia: Demografi-Politik Pasca-Soeharto*. Jakarta. LIPI Press

Sumber lain:

BAPPEDA Kab. Sigi, RIPKA Kabupaten Sigi, tahun 2011